

KATA PENGANTAR

Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, sudah seharusnya kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan nikmatnya kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan untuk mengemban tugas untuk mewujudkan cita-cita bangsa kearah kemajuan, kesejahteraan dan keadilan dalam segala bidang kehidupan.

Mahkamah Agung mempunyai visi untuk Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung seperti yang tercantum dalam Cetak Biru Mahkamah Agung Tahun 2010-2035. Tugas berat namun mulia ini harus kita laksanakan dengan kesungguhan, efektif, efisien, dan akuntabel serta bertanggung jawab. Untuk itu diperlukan sinergitas dan koordinasi yang mantap seluruh pelaksana tugas melalui pelaksanaan program kerja di bidang peradilan agar seluruh sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam berbagai dokumen perencanaan dapat tercapai dengan baik.

Sebagai pertanggungjawaban atas Kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selama tahun anggaran 2011, Kami menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2011, sebagaimana ditegaskan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Hal ini semata-mata Kami tunjukan kepada masyarakat bahwa Kami Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome.

Semoga penyajian LAKIP Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja kedepan secara lebih produktif, efisien dan efektif, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

DI SAMARINDA

KETUA

I GEDE SUMITRA, SH,MH

IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu organisasi atau lembaga. Atas landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tahun 2011 ini disusun. LAKIP ini menyampaikan informasi tentang capaian kinerja dari satuan kerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selama tahun 2011 yang merupakan pelaksanaan amanah atau mandat yang diemban oleh lembaga atau organisasi. Walaupun Inpres nomor 7 tahun 1999 memang mensyaratkan setiap instansi pemerintah menyusun laporan akuntabilitas, namun LAKIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja yang telah dicapai dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

LAKIP tahun 2011 ini juga menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Banding dan sesuai dengan visi misinya yaitu Mewujudkan Peradilan Yang Agung melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta menjawab panggilan pelayanan publik.

Kedepannya diperlukan penguatan peran Pengadilan Tinggi sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang masuk dalam tingkat banding sehingga visi dan misi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung pada akhirnya dapat tercapai dengan baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Tugas Pokok dan Fungsi
	C. Sistematika Penyajian
BAB II	PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
	A. Rencana Strategis 2010-2014
	1. Visi dan Misi
	2. Tujuan dan Sasaran Strategis
	3. Program Utama dan Kegiatan Pokok
	B. Rencana Kinerja Tahunan 2011
	C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja)
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	A. Pengukuran Kinerja
	B. Analisis Akuntabilitas Kinerja
BAB IV	PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran-Saran
LAMPIRAN	
1.	Struktur Organisasi
2.	Indikator Kinerja Utama (IKU)
3.	Matriks Renstra 2010-2014
4.	SK Tim Penyusun LAKIP
5.	Lampiran-Lampiran Lainnya

